



BerAKHLAK
Cita dan Moralitas Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

AMN
ADMINISTRASI MUDAH - BERKUALITAS

**#KOLABORASI
BANGUN
NEGERI**

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2026

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PEKANBARU
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Gedung Lontiok. Lt. 3
Pekanbaru Riau, 28292 Laman : Inspektorat.pekanbaru.go.id

Pekanbaru, 20 April 2026

Nomor : B.700/INSP-IRBAN II/ 31 /2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2026

Yth. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru

Berikut ini adalah informasi pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2026 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru:

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- b. Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 280 tahun 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2026;

2. Tujuan:

- a. Informasi pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah;
- b. Informasi implementasi AKIP;
- c. Nilai implementasi AKIP;
- d. Nilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- e. Saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- f. Monitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

3. Ruang lingkup:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja dan
- e. Penilaian capaian kinerja atau output ataupun outcome serta kinerja lainnya.

4. Metodologi:

Evaluasi AKIP menggunakan metodologi kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan, kemanfaatan, tujuan evaluasi, waktu penugasan, serta kendala yang ada, dan memadukannya dengan metodologi kualitatif berdasarkan professional judgement evaluator.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi hasil evaluasi tahun kemarin yang sudah dilaksanakan:

- a. Perencanaan : - dari -
- b. Pengukuran : - dari -
- c. Pelaporan : - dari -
- d. Evaluasi internal : - dari -

II. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi AKIP di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru diberikan nilai seperti tertuang pada tabel di bawah ini:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	22,8
2	Pengukuran Kinerja	30	19,5
3	Pelaporan Kinerja	15	9,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,8
	Nilai Hasil Evaluasi	100	63,5

Hal tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja.

Dari evaluasi diketahui bahwa perencanaan kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan.
- Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja tidak dapat dicapai.
- Setiap dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, selaras antara setiap kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading).
- Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).
- Rencana Aksi belum didukung dengan aktivitas yang memadai dalam mencapai kinerja.
- Target yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan kinerja masih belum tercapai dengan baik, atau off the track.

2. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja.

Dari evaluasi diketahui bahwa pengukuran kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- Pada dokumen IKU belum terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- Belum terdapat mekanisme Pengukuran/ Pemantuan Data Kinerja

- c. Belum terdapat pengukuran/ pemantauan kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan.

3. Evaluasi terhadap pelaporan kinerja.

Dari evaluasi diketahui bahwa pelaporan kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Dokumen laporan kinerja belum disusun secara berkala (Laporan Kinerja 3 bulan atau 1 bulan).
- b. Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- c. Dokumen laporan kinerja belum dipublikasikan.(Screenshoot upload pada website belum ditemukan);

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dari evaluasi diketahui bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja memiliki kelemahan antara lain:

- a. Rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti (matrik tindak lanjut evaluasi AKIP belum ditemukan).

III. Penutup

a. Simpulan

Penerapan AKIP di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru memperoleh nilai sebesar **63,5** yang berarti berpredikat **"B" atau baik** . Hal ini menginformasikan bahwa penerapan AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

b. Saran/ rekomendasi.

Berdasarkan kondisi dan simpulan di atas, maka dengan ini kami sarankan kepada Bapak untuk:

1. Perencanaan kinerja

- a. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website Pemerintah resmi atau Perangkat Daerah tepat wakt.
- b. Menyusun target kinerja yang realistis dan dapat dicapai.

- c. Menyusun dokumen Cascading yang menggambarkan hubungan berkesinambungan, selaras antara setiap kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.
 - d. Menyusun dokumen Crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
 - e. Menyusun Rencana Aksi yang memuat aktivitas dalam mencapai kinerja.
2. Pengukuran kinerja
- a. Menyusun IKU yang memuat Definisi Operasional (DO) dan Formulasi Pengukurannya.
 - b. Menyusun mekanisme/ SOP pengukuran kinerja;
 - c. Menyusun Pedoman Umum memberikan penghargaan/ reward dan hukuman/ punishment kepada seluruh PNS berdasarkan capaian kinerja 3 bulanan;
3. Pelaporan kinerja
- a. Menyusun laporan kinerja 3 bulanan dan menyampaikannya di situs perangkat daerah, gerai SAKIP Pemko Pekanbaru, dan e-SR Kemenpan;
 - b. Menyampaikan atau mengupload dokumen Laporan Kinerja sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya dan melampirkan bukti screenshot pada e-SR Kemenpan.
4. Evaluasi internal
- a. Menyusun matriks rencana tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), termasuk rekomendasi evaluasi tahun-tahun sebelumnya yang masih belum tuntas ditindaklanjuti, dan melaksanakannya sesuai rekomendasi.

Kami sebagai evaluator selalu mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerjanya. Caranya dengan komitmen mendampingi perangkat daerah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Akan tetapi, hal itu hanya bisa bermanfaat bila dikolaborasikan dengan komitmen dan usaha seluruh

mendampingi perangkat daerah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Akan tetapi, hal itu hanya bisa bermanfaat bila dikolaborasikan dengan komitmen dan usaha seluruh pemangku kepentingan perangkat daerah tersebut. Untuk itu, melalui laporan ini kami juga melakukan pendampingan serta kolaborasi terhadap Bapak/ Ibu Kepala Perangkat Daerah.

Demikian laporan pelaksanaan evaluasi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya selama pelaksanaan evaluasi.

Inspektur,



Dr Tr. H. Zulhelmi Arifin, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19810719 199912 1 00100

Tembusan disampaikan kepada yth:
Wali Kota Pekanbaru.